

8322g

**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP
PENGELUARAN RUTIN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH DATI II SIDRAP**



Oleh :
HEMIANTI
93 01 171

PERMINTAAN	
Tgl. terbit	15 Maret 1999
Asal dari	Fak. Ekonomi
Fungsinya	1 (satu) ekus
Harga	Hadiah
No. Inventaris	99 06 2585
No. Ekus	

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1999**

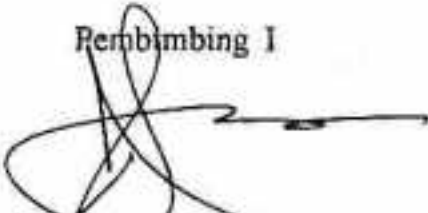
**KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP PENGELUARAN RUTIN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DATI II SIDRAP**

Oleh :
HEMIANTI
No. Mahasiswa : 93 01 171

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi
Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Pada
Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
Ujung Pandang


Disetujui oleh :

Pembimbing I



(Drs. Nuhun Ahmad, MS.)

Pembimbing II



(Dra. Nursini, MA.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, senantiasa kami panjatkan keharibaan Ilahi Rabbi, sebagai wujud kesahduan ditengah kegembiraan menyambut berakhirnya penulisan skripsi ini sekaligus simbol kesyukuran, karena Rahmat dan Hidayahnya, akhirnya penulisan skripsi ini dapat dirampungkan tepat pada waktunya.

Pada batas kemampuan telah dikerahkan, namun nyatanya masih jauh dari kesempurnaan untuk menjadi suatu karya ilmiah yang baik. Oleh sebab itu dengan kerendahan hati, penulis nantikan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak yang ingin membantu penulis untuk menyempurnakannya, jika sekiranya tulisan ini terdapat kekeliruan. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih.

Dengan terwujudnya skripsi ini adalah berkat bimbingan dan petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. DR. H. Djabir Hamzah, MA, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. DR. Muhammad Yunus Zain, MA, Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Drs. Nuhun Ahmad, MS, Dosen Pembimbing Pertama, dan Dra. Nursini, MA, Dosen Pembimbing Kedua, atas kesediaan dan kerelaan hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memeriksa serta memberikan petunjuk dalam penyusunan sampai selesainya skripsi ini.

4. Drs. Abdul Hamid Paddu, MA, selaku Penasehat Akademik.
5. Drs. A. Kahar Akil, MS, serta seluruh dosen pada Fakultas Ekonomi Unhas yang telah membekali penulis dengan berbagai Ilmu Pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis.
6. Semua rekan-rekan seasrama : Irma, Suri, Idha, Hikma, adek Polo, Bram, Anti dua dkk. Tak lupa teman-teman kuliah : Harma, Fitria, Ati, serta Seluruh rekan-rekan yang tidak dapat lagi disebut satu persatu.

Selanjutnya, tak lupa penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Suleng Ali, BA dan Ibunda Hj. P. Dewi Warna yang telah berkenan melimpahkan kasih sayang dan doa restu selama penulis menyelesaikan pendidikan di Unhas. Begitu pula kepada kakanda Ridhayana S.H, Ir. Imran, Hermina dan Adinda Yuliyanti yang telah memberi dukungan moril selama penulisan skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini pada almamater sebagai wujud kecintaan. Semoga petunjuk dan hidayah Allah SWT tetap kita raih untuk menempuh perjalanan hidup yang masih cukup panjang ini. A m i e n .

Ujung Pandang, Pebruari 1999

Penulis

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	6
1.4 Hipotesis	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pendapatan Asli Daerah	9
2.2 Aspek Empiris Mengenai Pendapatan Asli Daerah	16
2.3 Pengeluaran Rutin	17
2.4 Aspek Empiris Pengeluaran Rutin	19
2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	20
BAB III METODOLOGI	
3.1 Kerangka Konseptual	25
3.2 Jenis dan Sumber Data	28
3.3 Metode Analisis	29

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Daerah Umum Daerah Penelitian	
Tingkat II Sidenreng Rappang	30
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Sidenreng Rappang	30
4.1.2 Keadaan Geografis	32
4.1.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Sidrap	36
4.2 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran	
Rutin dalam APBD Dati II Sidrap	39
4.2.1 Keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .	39
4.2.2 Pendapatan Asli Daerah Sidenreng Rappang	46
4.2.3 Pengeluaran Rutin Sidenreng Rappang	51
4.2.4 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap	
Pengeluaran Rutin Kabupaten Sidenreng Rappang .	54
4.2.5 Hambatan-Hambatan Penerimaan Pendapatan Asli	
Daerah	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran – Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	73

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1. Luas wilayah kabupaten Sidenreng Rappang Dirinci Menurut Kecamatan	34
2. Keadaan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Kecamatan	35
3. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993	37
4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sidrap Tahun Anggaran 1992/1993 – 1996/1997	40
5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Sidrap Tahun 1992/1993 – 1996/1997 menurut Jenis Penerimaan	48
6. Peranan Tiap-Tiap Sektor Pendapatan Asli Daerah Sidenreng Rappang 1992/1993 – 1996/1997	50
7. Realisasi Pengeluaran Rutin Pemda Tingkat II Sidrap Tahun 1992/1993 – 1996/1997	52
8. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Rutin Dalam APBD Sidenreng Rappang 1992/1993 – 1996/1997	55
9. Tanggapan Responden Tentang Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Kewajibannya	60
10. Tanggapan Responden Tentang Pentingnya Peningkatan Pengawasan dan Koordinasi oleh Aparat Pengelola Pendapatan Daerah	62
11. Tanggapan Responden Tentang Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Perpajakan	64

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual yang berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, perlu diciptakan suasana kemasyarakatan yang mendukung cita-cita pembangunan serta memanfaatkan kemampuan modal dan potensi dalam negeri.

Dalam usaha meningkatkan ekonomi suatu bangsa, maka perlu adanya pemanfaatan dan pengembangan potensi yang dimiliki baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia sehingga dapat mempercepat perkembangan pembangunan disegala bidang atau perkembangan menyeluruh dan serentak diberbagai bidang sektor perekonomian.

Berbagai kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah senantiasa bertujuan untuk memperbaiki, mempengaruhi, mengarahkan serta dapat mengadakan

perubahan-perubahan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi selalu diarahkan pada penentuan sasaran dan prioritas pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan, stabilitas serta pemerataan pembangunan ke daerah-daerah yang terbelakang.

Pembangunan yang semakin meningkat memerlukan pula pengeluaran yang semakin besar. Peningkatan pengeluaran di satu pihak harus diimbangi dengan adanya peningkatan penerimaan di lain pihak. Keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran berarti dapat menjamin terlaksananya pembangunan yang telah dituangkan baik dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara yang ditetapkan pemerintah pusat, maupun ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Didalam usaha pelaksanaan pembangunan daerah, perlu ditunjang oleh tersedianya dana terutama yang bersumber dari daerah itu sendiri, di mana daerah tersebut harus mempunyai sumber-sumber keuangan sekurang-kurangnya dapat menutupi pengeluaran rutin

daerah agar tidak terlalu menggantungkan diri pada subsidi dan bantuan dari pemerintah pusat. Sesuai yang telah digariskan pemerintah pusat, maka daerah dapat mengarahkan potensi daerahnya guna meningkatkan pembangunan daerah. Untuk itu maka daerah-daerah perlu meningkatkan penerimaan daerah utamanya, peningkatan pendapatan asli daerah.

Dalam penjelasan resmi UU No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, mengenai sumber-sumber keuangan daerah dikemukakan sebagai berikut :

" Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ". (UU No. 5 Tahun 1974, hal : 39).

Berdasarkan pada kutipan di atas, berarti dalam usaha penyebaran pembangunan di seluruh tanah air, daerah harus meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri agar dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

Mengenal keuangan daerah tidak hanya dilihat dari sisi penerimaan daerah tetapi harus juga ditelaah segi pengeluaran daerah segala kegiatan sektor publik di daerah Indonesia dilakukan oleh pemerintah pusat dan oleh pemerintah daerah itu sendiri (Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II), di dalam menjalankan fungsi otonomi daerah. Kegiatan pembangunan di daerah terdiri atas kegiatan sektoral yang dilakukan pemerintah pusat, dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kegiatan regional yang dilakukan pemerintah daerah otonomi, dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Macam-macam pengeluaran daerah (Tingkat I dan Tingkat II) seperti yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yakni segala pengeluaran yang dibiayai oleh sumber penerimaan asli daerah, subsidi daerah otonomi dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran rutin daerah dan pengeluaran pembangunan.

Sisi pengeluaran yang dibiayai oleh pendapatan asli daerah yaitu pengeluaran rutin karena pengeluaran ini untuk menunjang penyelenggaraan

pelbagai kegiatan sehari-hari pemerintahan daerah dan selalu berulang (recurrent) setiap hari.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas maka penulis mengambil judul " Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Rutin Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kabupaten Sidenreng Rappang ".

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul dan latar belakang, maka permasalahan pokok yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Berapa besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dati II Sidrap.
2. Faktor-faktor apa yang merupakan penghambat bagi peningkatan pendapatan asli daerah di Dati II Sidrap.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi peningkatan pendapatan asli daerah di Dati II Sidrap.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Sebagai masukan atau pertimbangan kepada pemerintah daerah dalam rangka menyempurnakan usaha pengolahan sumber-sumber pendapatan asli daerah.
2. Dapat dijadikan informasi dan bahan bagi yang akan melakukan penelitian tentang pendapatan asli daerah.

1.4 Hipotesis

Dengan adanya permasalahan di atas, maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin adalah kecil.
2. Diduga bahwa kurangnya kesadaran wajib pajak serta pengawasan dan koordinasi merupakan faktor-faktor penghambat peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.5 Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan selanjutnya maka penulis menyusun dengan sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab I. Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Pada bab ini diuraikan tentang pendapatan asli daerah (PAD), Aspek empiris mengenai Pendapatan Asli Daerah, pengeluaran rutin, beberapa aspek empiris mengenai pengeluaran rutin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bab III. Metodologi

Bab ini terdiri dari kerangka konseptual, jenis dan sumber data, metode analisis.

Bab IV. Hasil dan pembahasan yang terdiri dari.

Gambaran umum daerah, sejarah singkat Kabupaten Sidenreng Rappang, keadaan geografis, keadaan demografis Sidenreng Rappang, struktur perekonomian Kabupaten Sidrap, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin dalam APBD Dati II Sidrap, anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, pengeluaran rutin Sidrap, kemudian dibahas tentang kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran rutin Kabupaten Sidenreng Rappang serta hambatan-hambatan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah Sidrap.

Bab V. Kesimpulan dan Saran.

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangga daerahnya diprioritaskan pada penggalian dan mobilisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah , disamping penerimaan lainnya.

Berdasarkan pasal 55 UU No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah mengelompokkan sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu :

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil perusahaan daerah
4. Dan lain-lain usaha daerah yang sah

Berikut ini diuraikan tentang sumber-sumber Pendapatan Daerah, yaitu :

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah merupakan sumber dana yang terpenting adalah dalam peranannya dalam pembangunan daerah. Sebelum penulis menguraikan pengertian pajak daerah, maka terlebih dahulu dikemukakan

pengertian pajak secara umum. Dibawah ini defenisi yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Sumitro, bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontrakprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum" (R. Santoso Brotodiharjo, 1993, Hlm 5-6).

Berdasarkan defenisi yang dikemukakan tersebut, maka pajak adalah suatu pembayaran kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tanpa mendapatkan jasa yang secara langsung.

Selanjutnya pengertian pajak UU No.10. Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah dikemukakan sebagai berikut :

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah".

Definisi lain yang dikemukakan oleh Drs. Mardiasmo, MBA, Akt. Adalah sebagai berikut :

"Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut". (Mardiasmo, 1994, Hal 34).

Dari definisi tersebut bahwa pajak daerah adalah merupakan sumber dana yang wajib dan dipungut oleh daerah untuk kepentingan pendanaan dan pembiayaan daerah.

Pajak daerah yang dilaksanakan pemungutannya di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Pajak potong hewan
2. Pajak pembangunan I
3. Pajak pertunjukkan dan keramaian
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak kendaraan tidak bermotor
7. Pajak pendaftaran perusahaan
8. Tunggangan pajak

2. Retribusi

Retribusi merupakan salah satu sumber jenis pungutan pemerintah yang merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah, sedangkan pengertian retribusi itu adalah : " Hasil pungutan daerah sebagai balas jasa yang diperoleh dari pemakaian jasa, pekerjaan, pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah, yang dilaksanakan dengan peraturan daerah yang didasarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku". (Nota Keuangan dan RAPBN, 1992/ 1993).

Kebijaksanaan memungut bayar untuk barang yang disediakan oleh pemerintah berpangkal pada efisiensi ekonomi. Dalam artian seseorang bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya.

Pada dasarnya retribusi daerah pada Dati II lebih beragam dan bervariasi antara dati II yang satu dengan yang lainnya. Semakin berkembang suatu daerah semakin banyak fasilitas ataupun jasa yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah setempat untuk kegiatan perekonomian masyarakat, sehingga

banyak pula jenis retribusi yang dapat dipungut daerah tersebut.

Retribusi daerah yang dilaksanakan pemungutannya di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Uang Legalisasi
2. Uang dispensasi jalan
3. Uang pangkal hasil bumi
4. Uang pemeriksaan pembantaian (keur hewan)
5. Uang sewa tanah dan pembangunan
6. Uang sampah dan isi bangunan
7. Stasiun bis dan taxi
8. Rumah sakit/balai pengobatan
9. Retribusi pasar
10. Retribusi huller
11. Bea ikan
12. Retribusi parkir kendaraan
13. Sewa barang milik daerah yang digunausahakan
14. Penerimaan hasil tanah ordamen
15. Retribusi rumah potong hewan
16. Penerimaan harga KTP/KK/No. Rumah
17. Retribusi izin trayek
18. Retribusi sampah

19. Uang dokumen lelang
20. Izin penggunaan jalan
21. Izin gangguan Ho
22. Pemeriksaan kesehatan calon pengantin
23. Iuran pelayanan irigasi.

3. Hasil Perusahaan Daerah

Perusahaan daerah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962. Tentang Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan /atau berdasarkan undang-undang hasil perusahaan daerah atau badan lain yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan daerah yang dibentuk dalam rangka turut serta melaksanakan pembangunan daerah, dengan mengutamakan pemberian jasa dukungan kepada masyarakat, memberikan dukungan dari sumbangan bagi ekonomi daerah di samping merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Penerimaan yang berupa bagian laba BUMD :

yang terdiri dari laba Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum dan Bagian Laba BUMD lainnya.

4. Lain-Lain Usaha Daerah

lain-lain usaha daerah yang sah, adalah merupakan penerimaan daerah dari berbagai kegiatan yang bersifat bisnis maupun non materi. Yang termasuk penerimaan lain-lain yang telah dilakukan pemungutannya di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah:

1. Jasa giro
2. Penerimaan jasa dokter
3. Penerimaan lainnya

Selain sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah dibahas diatas, juga diadakan pemungutan penerimaan dinas-dinas didaerah. Di Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dilaksanakan sebagai berikut adalah :

1. Penerimaan Dinas Peternakan
2. Penerimaan Dinas Perikanan

2.2 Aspek Empiris Mengenai Pendapatan Asli Daerah.

Pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia, bersumber dari dua kelompok, yakni dari (1) sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri baik dari pemerintah maupun dari swasta atau dari swadaya masyarakat dan (2) sumber yang berasal dari luar daerah baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pemerintah atasan maupun investasi swasta dari luar daerah.

Secara khusus untuk sumber dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, menurut Hirawan dalam Anwar, Asis dan Basri, 1992 diberikan melalui dua jalur, yakni dana sektoral (DIP) dan Dana regional (Inpres).

Pembiayaan pembangunan melalui sistem DIP di rencanakan melalui sisten Bottom-up dengan pengambilan keputusan dari tingkat depertemen. Prioritas pembangunan berorientasi pada sektor, dengan para pelaksana berasal dari aparatatur pusat yang ada di daerah, dimana penentuan pimpinan proyek ditetapkan oleh menteri. Oleh karena itu, sering terdengar bahwa pemerintah daerah merasa tidak puas,

karana merasa tidak ikut sertakan dalam pengambilan keputusan dalam investasi dana yang berasal dari DIP. Dana DIP ini disalurkan melalui Departamen teknis yang mempunyai aparat-aparatnya sendiri di daerah dan tidak melalui pemerintah daerah.

2.3. Pengeluaran Rutin

Anggaran pengeluaran dalam APBD terbagi dalam dua kelompok besar, yakni anggaran untuk belanja rutin dan anggaran untuk pembiayaan pembangunan. Alokasi pada dua kelompok ini tidak ditetapkan persinya secara baku, hanya saja biasanya sangat terkait langsung dengan tingkat aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah yang bersangkutan. Biasanya anggaran belanja rutinnya lebih besar daripada anggaran biaya pembangunan. Untuk daerah yang sudah berkembang atau dengan alasan untuk mengejar ketertinggalan, biasanya anggaran rutinnya lebih kecil dari anggaran pembangunannya. Sedangkan daerah yang sudah maju, maka kembali anggaran rutinnya lebih besar daripada anggaran pembangunannya. Dalam

kondisi demikian yang lebih banyak melakukan kegiatan investasi adalah sektor swasta/masyarakat.

Pengeluaran rutin daerah, seperti yang disebutkan dalam APBN (1995) yakni dana yang dikeluarkan untuk menunjang kelancaran berbagai kegiatan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, tinggi rendahnya aktivitas pemerintah daerah dibidang pemerintahan juga tercermin dari tinggi rendahnya pengeluaran rutin tersebut. Meningkatnya jumlah penduduk sangat erat kaitannya dengan meningkatnya kegiatan pemerintahan di daerah. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat dibidang pelayanan, yang pada gilirannya membawa pengaruh terhadap peningkatan administrasi di lingkungan daerah . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemberian pelayanan umum kepada masyarakat merupakan inti dari kegiatan rutin di samping yang bersifat administratif.

2.4 Aspek Empiris Pengeluaran Rutin.

Pengeluaran rutin daerah dalam hal ini merupakan suatu anggaran belanja yang telah disiapkan oleh pemerintahan daerah melalui pengesahan DPRD tingkat II untuk membiayai segala kebutuhan daerah secara rutin.

Dalam menentukan anggaran rutin pemerintah daerah sebagai badan eksekutif telah menyiapkan tiap-tiap pos untuk mendapat pembiayaan melalui anggaran rutin daerah yang disahkan oleh DPRD Tingkat II. Sebelum hal ini dibahas lebih lanjut maka perlu terlebih dahulu disebutkan sektor-sektor pengeluaran rutin daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan daerah.

Sektor-sektor belanja rutin yang ada di Daerah tingkat II Sidrap terdiri dari atas :

- Belanja pegawai
- Belanja barang
- Belanja pemeliharaan
- Belanja pengeluaran dinas-dinas
- Dan belanja lain-lain

Pada pelaksanaannya belanja rutin di daerah sebagaimana telah dikatakan bahwa pemerintah daerah terlebih dahulu menyiapkan pos-posnya. Salah satu jalan ditempuh adalah mengusahakan agar pemerintah daerah sedapat mungkin meningkatkan pemasukkan pendapatan asli daerahnya, yang berperan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutinnya.

2.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Dalam melaksanakan pembangunan yang merata pada seluruh pelosok tanah air serta terjadinya kesinambungan, pemerintah mengambil beberapa kebijaksanaan penting, yang tertuang dalam rencana tahun, terutama yang terkait langsung dengan bidang keuangan atau dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sebagaimana halnya pemerintah pusat, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta untuk melaksanakan tugas-tugas yang diemban pemerintah daerah, maka mutlak mempunyai suatu rencana yang mana untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Pada hakekatnya keuangan merupakan hal

penentuan di dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, yang dapat pula dikatakan tugas pemerintah yang penting adalah dalam hal pengurus keuangan. Gambaran tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam bidang keuangan atau pembiayaan pembangunan tersebut, lebih dikenal sebagai anggaran daerah di mana merupakan rencana yang menggambarkan rangkaian atau kegiatan yang dinyatakan bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu.

Dengan demikian, berbagai ahli memberikan batasan/defenisi mengenai anggaran seperti yang dikemukakan oleh M. Suparmoko (1987, Hlm 49) sebagai berikut :

"Anggaran (budget) adalah suatu daftar/ pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu yang biasanya dalam satu tahun".

Sedangkan Achir (1975), yang dikutip dari catatan mata kuliah, memberikan pengertian anggaran sebagai berikut :

"Anggaran adalah merupakan anggaran kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka-angka pemasukan pemerintah (pendapatan) negara untuk menutupi pengeluaran negara".

Kesimpulan yang dapat ditarik dari dua pendapat tersebut yakni merupakan rencana pemerintah yang terkait langsung dengan rencana pembangunan. Pembangunan yang dalam pelaksanaannya dilihat dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dengan demikian, pengertian APBN dapat diartikan sebagai suatu rencana kerja keuangan dimana pada satu sisi berisi angka-angka pengeluaran yang pada dasarnya mencerminkan pilihan kebijaksanaan yang akan dilaksanakan dalam suatu periode pada masa yang akan datang.

Didalam perkembangan Negara Indonesia Undang-Undang yang mengatur keuangan daerah adalah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1, yang berbunyi

"Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila DPR tidak menyetujui anggaran yang diusulkan oleh pemerintah, maka penerimaan menggunakan anggaran tahun lalu ". (Departemen Penerangan RI, 1975, hlm 7).

Ketentuan pasal 23 ayat 1 dipandang sebagai dasar yang menjamin konstitusi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah menjalankan anggaran tersebut. Telah diatur dalam peraturan pemerintah No. 5 Tahun 1975 pasal 64, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Tahun anggaran daerah adalah sama dengan tahun anggaran negara.
- 2) Dengan peraturan pemerintah daerah tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya enam bulan setelah ditetapkan APBD untuk tahun anggaran sebelumnya.
- 3) Dengan peraturan daerah, tiap-tiap tahun selambat-lambatnya enam bulan setelah ditetapkan APBD untuk tahun anggaran APBD.
- 4) APBD permulaan tahun anggaran bersangkutan mendapatkan pengesahan dari pejabat yang bersangkutan dan belum diundangkan maka pemerintah daerah menggunakan anggaran tahun sebelumnya.
- 5) Pemerintah daerah wajib berusaha mencapai anggaran rutin dengan pendapatan sendiri.

- 6) APBD serta perubahannya sepanjang dikuasakan sendiri oleh anggaran itu dilaksanakan sesudah pengesahan pejabat yang bersangkutan.
- 7) Pengesahan atau penolakan APBD oleh pejabat bersangkutan
- 8) Dengan peraturan pemerintah di atas ketentuan cara :
 - Penyusunan anggaran
 - Pengurus
 - Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 9) Dengan peraturan menteri dalam negeri diatur pelaksanaannya yang dimaksud dalam point 8.
Adanya peraturan daerah yang mengatur keuangan daerah dimana akan menjadi pedoman pemerintah daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III

METODOLOGI

3.1 Kerangka Konseptual

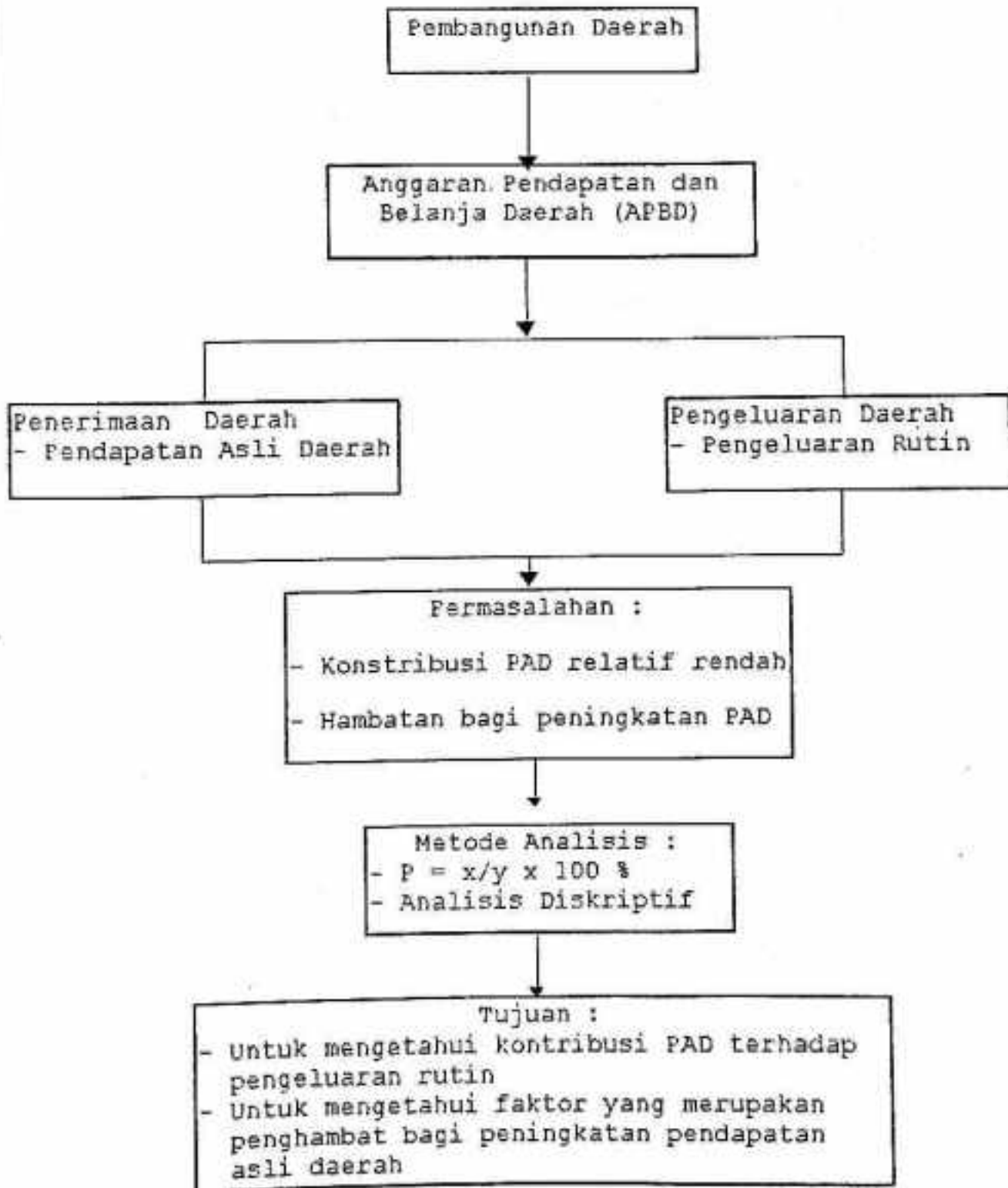
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) antara lain telah mengamanatkan bahwa pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan keserasian dan keseimbangan Pembangunan Nasional berwawasan nusantara, serta sebagai Pengamalan Pancasila.

Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam rangka meningkatkan pembangunan daerah maka diperlukan pula peningkatan penerimaan daerah untuk membiayai aktivitas-aktivitas pemerintah dibidang pembangunan, maka dengan itu dalam upaya

membiayai pengeluaran yang diperlukan bagi kegiatan-kegiatan, mengumpulkan/memperoleh dana dari beberapa sumber. Pertama dari sumber yang dikategorikan sebagai pendapatan asli daerah, kedua bagi hasil pajak/bukan pajak. Ketiga, adalah sumbangan dan bantuan. Keempat, penerimaan pembangunan.

Dalam penelitian kali ini yang dibahas adalah peranan pendapatan asli daerah dalam membiayai aktivitas-aktivitas pemerintah daerah yaitu melalui pengeluaran rutin. Semakin meningkatnya aktivitas pemerintah daerah maka dengan sendirinya biaya yang diperlukan semakin besar pula, untuk itu perlu ditingkatkan sisi penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Khususnya pendapatan asli daerah, Selanjutnya untuk mempermudah proses penelitian ini maka dikemukakan kerangka pemikiran sebagai kerangka kerja, seperti ini :

Kerangka Konseptual/pemikiran

3.2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sekunder

Data sekunder, yang meliputi laporan tahunan atau hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai instansi antara lain : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Sidrap, Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang Sub. Bagian Keuangan dan Instansi-instansi terkait yang mendukung kelengkapan data serta dari literatur yang mendukung penelitian ini.

2. Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden. Yang meliputi pengumpulan data yang dilakukan dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada responden yang telah ditentukan antara lain : Staf Dinas Pendapatan Daerah, Staf Keuangan Setwilda dan masyarakat Kabupaten Sidrap.

3.3 Metode Analisis

- Untuk menghitung besarnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin di Dati II Sidrap, digunakan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{x}{y} \times 100 \%$$

Dimana:

P = Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin.

X = Realisasi pendapatan asli daerah

Y = Realisasi pengeluaran rutin.

- Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat bagi peningkatan pendapatan asli daerah, maka digunakan metode diskriptif.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian Tingkat II Sidenreng Rappang

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Sidenreng Rappang

Ketika Sumange Rukka dinobatkan menjadi Adattuang Sidenreng pada tahun 1889-1904, kerajaan Sidenreng dan kerajaan Rappang terlebur dalam pemerintahan seorang penguasa sebagai Adattuang Sidenreng Rappang. Sejak itu Sidenreng Rappang menjadi suatu kesatuan yang utuh. Akan tetapi pada saat La Sadopotto memangku jabatan Adattuang Sidenreng Rappang ke XII merangkap Arung Rappang ke XX wilayahnya tunduk pada ekspedisi kolonial Belanda yang dinyatakan pada suatu pernyataan yang disebut Korte Verklaring. Setelah mengadakan perlawanan sengit bersama panglima-panglima peran Andi Pankanna dan Andi Noni, kedudukan Adattuang Sidenreng Rappang di ambil alih oleh pemerintah Belanda pada tahun 1906. Sidenreng Rappang di jadikan dua wilayah masing-masing berdiri sebagai kerajaan

Sidenreng dan kerajaan Rappang. Pengangkatan pejabat-pejabat penting harus di ketahui oleh pemerintah Belanda. Dan selanjutnya Sidenreng Rappang ketika itu berstatus distrik dalam wilayah afdeling Pare-pare.

Didalam lembaga negara 1917 No.249 kedua wilayah tersebut menjadi cabang pemerintahan terlepas dari cabang pemerintahan Pare-pare yang kemudian disebut Older Afdeling Sidenreng Rappang. Didalamnya tetap terdapat dengan jelas dengan kata lain wilayahnya berada di wilayah pemerintahan "Controlaur" yang berkedudukan di Rappang. Dimana wilayahnya terdapat dalam wilayah Administratif yang disebut dengan Daerah Adat Sidenreng dan Daerah Adat Rappang, pejabat daerah menurut jenjang Pemerintahan Hindia Belanda itu disebut Regen yang dibawah pengawasan Controlaur. Keadaan ini berlangsung hingga masa pemerintahan pendudukan Jepang yang berada pada masa itu kemudian di bawah pengawasan Bon Ken Kanrikan.

Dengan lahirnya Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi maka wilayah Swapraja Sidenreng dan Swapraja Rappang dinyatakan sebagai satu daerah otonom Tingkat II yang pusat pemerintahannya berkedudukan di Pangkajene Sidenreng, dan sejak itu daerah ini mengalami pengembangan di bawah struktur pimpinan Bupati Kepala Daerah.

Demikian uraian singkat mengenai sejarah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Motto "RESOPA TEMMANGGINGI NAMALOMO NALETEI PAMASE DEWATA"

4.1.2 Keadaan Geografis

Merupakan salah satu daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak sekitar 180 Km dari Kotamadya Ujung Pandang dan diantara 3,43 - 4,09 Lintang Selatan dengan batas astronomi 119,41 - 120,10 Bujur timur.

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Adapun batas-batas administratif Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur : Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppang.
- Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang dan Kotamadya Pare-Pare.

Wilayah administratif Kabupaten Sidenreng Rappang dengan luas 1.883.25 Km² terdiri dari 11 kecamatan yang terdiri dari 7 kecamatan defenitif dan 4 kecamatan perwakilan, dengan jumlah desa/kelurahan 102 (66 defenitif dan 36 persiapan). Adapun luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dirinci menurut kecamatan dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1 : Luas Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang
dirinci Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)	% Luas Kab.
1.	Panca Lautang	153,93	8,17
2.	Tellu Limpoe	103,20	5,48
3.	Watang Pulu	151,31	8,03
4.	Baranti	53,89	2,86
5.	Panca Rijang	34,02	1,81
6.	Perw. Kulo	74,96	3,98
7.	Maritengngae	65,90	3,50
8.	Perw. Sidenreng	120,81	6,41
9.	Dua Pitue	69,99	3,72
10.	Per. Pitu Riawa	210,47	11,18
11.	Per. Pitu riase	210,47	44,86
JUMLAH		1.883,25	100,00

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang (Kabupaten Sidenreng Rappang Dalam Angka 1996/1997)

4.1.3 Keadaan Demografis

Penduduk merupakan salah aspek penting dalam pembangunan karena penduduk merupakan objek sekaligus subyek dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun 1996. Jumlah penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 237.962 jiwa. Dengan perincian jumlah laki-

laki sebanyak 112.454 jiwa dan perempuan sebanyak 125.508 jiwa.

Adapun keadaan penduduk Kabupaten Sidrap sebagai alokasi penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Keadaan Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang dirinci Menurut Kecamatan.

NO	KECAMATAN	Penduduk	Kepadatan/Km ²
1.	Panca lautang	19.719	128
2.	Tellu LimpoE	20.152	195
3.	Watang Pulu	22.506	147
4.	Baranti	24.156	448
5.	Perwakilan Kulo	11.722	156
6.	MaritengngaE	36.740	558
7.	Dua Pitue	25.634	366
8.	Perw. Pitu Riawa	21.451	102
9.	Perw. Pitu Riase	17.140	20
Jumlah		237.962	126

Sumber Data : Kantor Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang (Kabupaten Sidenreng Rappang dalam angka 1997)

Pada tabel ditunjukkan bahwa tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang adalah $126/\text{km}^2$ $237.962 : 1.883,25 \text{ km}^2 = 126/\text{km}^2$).

4.1.4 Struktur Perekonomian Kabupaten Sidrap

Berdasarkan hasil perhitungan PDRB Kabupaten Sidrap tahun 1996 diperoleh angka distribusi persentase atau biasa disebut struktur perekonomian menurut lapangan usaha. Struktur perekonomian ini memberi gambaran masing-masing sektor dalam pembentukan total PDRB suatu daerah. Semakin besar persentase suatu sektor semakin besar pula pengaruh sektor tersebut di dalam perekonomian daerah tersebut.

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa struktur perekonomian Kabupaten Sidrap masih didominasi oleh sektor pertanian. Pada tahun 1996 sektor ini memberi sumbangan sebesar 53,79 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Sidrap. Tahun sebelumnya, yaitu tahun 1995 sumbangan itu sebesar 53,01 persen.

Peranan kedua ditempati oleh sektor perdagangan, restoran dan hotel dengan kontribusi sebesar 14,76 persen dan pada tahun 1996 dan pada tahun 1995 sebesar 14,72 persen. Sektor jasa-jasa dengan kontribusi sebesar

8,74 persen pada tahun 1996 dan 8,85 persen pada tahun 1995 menempati urutan ketiga.

Tabel 3. Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 1993.

Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	55,02	53,93	53,01	53,79
2. Pertambangan dan Penggalian	1,68	1,96	2,49	2,15
3. Industri Pengolahan	4,26	4,31	5,33	4,97
4. Listrik, Gas dan Air bersih	0,60	0,83	0,79	0,79
5. Bangunan	5,57	5,92	5,90	5,72
6. Perdagangan, Restoran & Hotel	14,90	15,02	14,72	14,76
7. Angkutan dan Komunikasi	3,53	3,63	3,68	3,77
8. Keuangan, persewaan dan jasa Perusahaan	5,52	5,48	5,23	5,33
9. Jasa-jasa	8,86	8,92	8,85	8,74
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Kantor Statistik Kab. Sidrap

Selanjutnya yang berada pada urutan keempat adalah sektor bangunan dengan kontribusi sebesar 5,72 persen tahun 1996 dan pada tahun 1995 sebesar 5,90 persen kemudian

urutan kelima ditempati oleh sektor pengolahan dengan sumbangan sebesar 4,97 persen pada tahun 1996 dan pada tahun 1995 sebesar 5,33 persen. Selanjutnya sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati urutan keenam dengan peranan 5,32 persen pada tahun 1996 dan 5,23 persen pada tahun 1995.

Dengan memperhatikan struktur ekonomi menurut lapangan usaha Kabupaten Sidrap dapat di analisa bahwa pertumbuhan ekonominya cukup tinggi, yang merupakan bukti nyata adanya keberhasilan dalam pelaksana pembangunan daerah, utamanya pada sektor pertanian, industri perdagangan, jasa serta sektor-sektor lainnya.

Mengukur tingkat kemajuan perkembangan ekonomi pada suatu daerah dapat dilihat pada keadaan PDRB daerah bersangkutan, karena pendapatan regional suatu daerah merupakan pencerminan dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah dari tahun ke tahun.

4.2 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Rutin dalam APBD Dati II Sidrap

4.2.1 Keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pemerintah Daerah Tingkat II Sidrap melaksanakan pembangunan disegala bidang, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam wilayah daerahnya agar lebih maju. Hal ini selain dari program yang dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, juga ditunjang oleh sumber dana yang memadai, yang berasal dari sektor pemerintah daerah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak dan sumbangan/bantuan. Dan kesemuanya itu tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap, yang bertujuan untuk menunjang pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Dearah Sidrap.

Oleh karena itu untuk mengetahui keadaan pembangunan daerah Kabupaten Sidrap, maka akan dikemukakan realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidrap Tahun Anggaran 1992/1993-1996/1997, sebagaimana dalam tabel 4, berikut ini:

Tabel 4. Realisasi Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sidenrang Rappang Tahun Anggaran 1992/1993-1996/1997 (Rp 000).

No.	Jenis Penerimaan	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	Jumlah
1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	205.206	133.207	143.240	831.686	118.365	1.431.704
2	Pendapatan Asli Daerah	1.505.734	1.585.175	2.084.817	2.238.205	3.105.609	10.519.540
3	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	2.512.532	3.404.937	4.899.309	4.207.190	4.828.780	19.952.798
4	Sumbangan dan Bantuan	11.320.334	15.285.763	15.709.190	16.623.578	20.312.862	79.252.267
	Jumlah	15.543.876	20.409.072	22.709.720	23.900.659	28.365.616	111.158.309

40

No.	Jenis Pengeluaran	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997	Jumlah
1	Pengeluaran rutin	10.253.570	12.737.347	13.677.650	15.824.426	17.563.590	70.056.591
2	Pengeluaran Pembengunan	5.157.125	7.528.481	8.446.857	17.563.589	10.529.521	39.619.856
	Jumlah	15.410.695	20.265.831	22.124.607	23.782.289	28.093.110	109.676.437

(sumber data : Bagian Keuangan Setwilada IK II Sidrap)

Berdasarkan tabel di atas, nampak bahwa selama tahun anggaran 1992/1993 - 1996/1997 dari Rp 111,1 milyar hasil penerimaan pemerintah daerah/sumber-sumber penerimaan APBD, sektor sumbangan dan bantuan merupakan sektor penerimaan yang terbesar dari keempat komponen sumber penerimaan APBD yaitu mencapai Rp 79,2 milyar. Sumbangan dan bantuan tersebut diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat I. Tingginya sumbangan dan bantuan disebabkan oleh bertambahnya jumlah belanja rutin pegawai khususnya pegawai negeri sipil yang ada di daerah, meningkatnya belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran utang dan belanja lain-lain yang menyebabkan pendapatan asli daerah yang diharapkan dapat menutupi belanja rutin terutama untuk belanja pegawai, ternyata belum sebanding dengan besarnya jumlah pegawai tadi. Di samping itu sumbangan dan bantuan tersebut dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan di daerah tingkat II yaitu pembangunan sarana

kesehatan, sarana pendidikan, sarana perhubungan dan transportasi, penghijauan dan reboisasi dan bentuk-bentuk pembangunan lainnya.

Sedangkan sektor bagi hasil pajak/bukan pajak memberikan sumbangan sebesar Rp 19,9 milyar. Di Kabupaten Sidenreng Rappang bagi hasil pajak diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENKB) serta Alat Angkutan Air dan BEM A3. Sedangkan bagi hasil bukan pajak diperoleh dari Iuran Hasil Hutan (IHH), pemberian hak atas tanah, bahan galian tambang Golongan C, iuran pemeliharaan dan eksploitasi pengairan (IPEP) dan iuran air bawah tanah.

Selanjutnya Pendapatan Asli Daerah memberikan sumbangan sebesar Rp 10,5 milyar. Sektor PAD ini diperoleh melalui pajak daerah, retribusi daerah, bagi laba BUMD, Pos penerimaan Dinas-Dinas dan penerimaan lain-lain. Masih kecilnya sumbangan bagi PAD disebabkan karena

belum maksimalnya usaha intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memaksimalkan penerimaan PAD dan menggali sumber-sumber pendapatan baru. Sektor penerimaan APBD yang terkecil sumbangannya adalah perhitungan sisa lebih tahun anggaran yang lalu yaitu hanya Rp. 1,4 milyar.

Seiring dengan peningkatan penerimaan, pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dari tahun ke tahun juga mengalami Peningkatan. Dari tahun 1992/1993-1996/1997 dapat dilihat besarnya pengeluaran pemerintah daerah yaitu sebesar Rp 106,6 milyar yang terdiri dari pengeluaran rutin sebesar 70 milyar yang terdiri dari pengeluaran pembangunan sebesar Rp 39,6 milyar. Kenaikan pengeluaran pemerintah daerah Sidrap dari tahun ke tahun diakibatkan oleh kenaikan kedua komponen

pengeluaran, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan.

Pengeluaran rutin ini diperuntukkan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja lain. Sedangkan pengeluaran pembangunan diperuntukkan untuk membiayai pembangunan terutama diarahkan untuk membelajai sektor perhubungan dan pariwisata. Dengan sektor perhubungan dan pariwisata sebagai prioritas utama dalam struktur pengeluaran pembangunan diharapkan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil-hasil pembangunan, menciptakan lapangan kerja dan pengumpulan devisa. Sedang pengeluaran pembangunan meliputi pembiayaan program dan proyek, dialokasikan keberbagai sektor sesuai dengan urutan prioritas dan kebijaksanaan pembangunan.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana halnya dengan negara, maka daerah juga berfungsi untuk meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan masyarakatnya. Sehubungan dengan itu maka kebijaksanaan pemerintah pusat akan otonomi daerah di beberapa Kabupaten Sidenreng Rappang akan membawa konsekuensi perubahan di beberapa kegiatan pembangunan daerah, Salah satu konsekuensi tersebut adalah di berikannya kewenangan kegiatan pembangunan daerah termasuk kegiatan penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan asli daerah tersebut perlu di tingkatkan karena Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber dana yang sangat penting di dalam pendanaan dan pembelanjaan daerah.

Berdasarkan KepMen Dalam Negeri No. 903-057 Tahun 1988, yang mengelompokkan sumber-sumber penerimaan daerah. Yaitu :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
2. Pendapatan asli daerah
3. Bagi hasil pajak /non pajak
4. Sumbangan/ Bantuan dari SDO dan Inpres
5. Penerimaan pembangunan (Pinjaman pemerintah daerah dan pinjaman BUMD).

Dari 5 kelompok penerimaan daerah, pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan sumber penerimaan terbesar ketiga (tahun Anggaran 1992/1993-1996/1997), hal ini diakibatkan karena pengelolaan Pendapatan Asli Daerah belum dilakukan secara optimal, ini disebabkan karena potensi yang dimiliki belum sepenuhnya digarap dengan baik.

Untuk melihat dengan jelas bagaimana keadaan Pendapatan Asli Daerah Sidenreng Rappang, maka dikemukakan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Tahun 1992/1993-1996/1997, dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 1992/1993-1996/1997 dirinci Menurut Jenis Penerimaan (Dalam Ribuan Rupiah).

Jenis Penerimaan	1992/1993	1993/1994	1994/1995	1995/1996	1996/1997
1. Pajak Daerah	160.048	176.494	189.265	267.213	326.031
2. Retribusi Daerah	1.266.050	1.342.461	1.826.655	1.834.583	2.577.051
3. Bagian laba BUMD	1000	10.003	26.643	33.280	120.380
4. Penerimaan dinas-dinas	5.595	6.300	8.941	9.949	16.961
5. Penerimaan lain-lain	73.041	49.917	33.113	73.180	65.186
Jumlah	1.505.734	1.585.175	2.084.017	2.238.205	3.105.609

Sumber Data : Kantor DisPenda Tingkat II Sidrap

Dari tabel diatas terlihat bahwa pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 1993/1994 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,58 milyar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 1,50 milyar, hal ini disebabkan karena tetribusi daerah merupakan sumber penerimaan yang persentasenya besar. Itu menunjukkan semakin berkembangnya daerah ini, karena makin banyak fasilitas atas jasa yang telah disediakan pemerintah setempat untuk kegiatan masyarakatnya. sebagai pengganti jasa atas fasilitas yang diberikan

oleh daerah dikenakan retribusi daerah. Tahun 1994/1995 PAD naik sebesar Rp 2,08 milyar, selanjutnya tahun 1995/1996 naik menjadi Rp. 2,23 milyar dan terakhir tahun anggaran 1996/1997 naik hingga Rp 3,10 milyar, peningkatan tersebut terjadi dari tahun ke tahun. Selain kontribusi retribusi daerah juga peranan jenis penerimaan pajak daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain memberi kontribusi yang tidak sedikit

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui besarnya kontribusi tiap-tiap sektor dari komponen pendapatan asli daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah seperti terlihat pada tabel 6 dibawah ini :

Tabel 6. Peranan Tiap-tiap Sektor Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 1992/1993 - 1996/1997. (Rp.000)

Jenis Penerimaan		Realisasi	PAD (%)
1.	Pajak Daerah	1.139,051	10,83
2.	Retribusi Daerah	8.846,800	84,10
3.	Bagian laba BUMD	191.506	1.82
4.	Penerimaan dinas-dinas	47.746	0.45
5.	Penerimaan lain-lain	294.437	2.80
Jumlah		10.519,540	100.00

Sumber data : Kantor Dispenda Tingkat II Sidrap

Berdasarkan tabel di atas, nampak jelas bahwa retribusi daerah merupakan sektor penerimaan yang terbesar dari seluruh komponen pendapatan asli daerah selama lima tahun terakhir, yaitu mencapai Rp 8,8 milyar atau 84,10%. Kemudian menyusul jenis penerimaan pajak daerah yaitu sebesar Rp 1,1 milyar atau kontribusinya terhadap PAD sebesar 10,83%. Lalu menyusul sektor penerimaan lain-lain sebesar Rp 294 juta atau mencapai 2,80%. Sedangkan sektor bagian laba BUMD mencapai

Rp 191 juta atau 1,82%. Kontribusi terkecil terhadap keseluruhan pendapatan asli daerah dari penerimaan dinas-dinas yaitu hanya sebesar Rp 47 juta atau 0,45%.

4.2.3 Pengeluaran Rutin Sidenreng Rappang

Pengeluaran daerah yang dicantumkan dalam APBD, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan biaya pemeliharaan dan lainnya. Sedangkan secara sektoral pengeluaran pembangunan meliputi pengeluaran sektor pertanian dan pengairan, pertambangan dan energi, perhubungan dan pariwisata dan lainnya. Pengeluaran rutin yang dianggarkan agar sesuai kebutuhan riil tiap dinas/lembaga satuan kerja daerah lainnya dengan prioritas diarahkan untuk menunjang pada pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, pembayaran bunga dan cicilan hutang, kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah guna menghindari

adanya penurunan kemampuan produktif dan usia prasana yang telah di bangun.

Untuk melihat dengan jelas pengeluaran rutin Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 7 : Realisasi Pengeluaran Rutin Pemda Tingkat II Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 1992/1993 - 1996/1997 (Dalam Ribuan Rupiah)

Jenis pengeluaran	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97
1. Belanja Pegawai	7.836.818	10.079.556	10.714.442	12.459.224	14.165.065
2. Belanja barang	716.239	776.384	944.870	1.345.543	1.505.395
3. Biaya pemeliharaan	270.213	315.688	376.813	363.513	229.820
4. Belanja perjalanan dinas	145.726	238.798	224.037	220.959	242.752
5. Belanja la in-lain	729.464	938.779	1.009.117	1.059.837	1.011.685
6. Angsuran pinjaman / hutang & bunga	244.376	75.000	75.000	75.000	-
7. Ganjaran Subsidi & Sumbangan Kepada Daerah Bawah	-	-	-	-	-
8. Pensiunan Bantuan dan Onderstand	3.338	3.306	2983	2.486	2.983
9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	264.264	307.763	329.688	297.350	335.867
10. Pengeluaran tak disangka	21.134	61	-	709	-
JUMLAH	10.253.570	12.737.347	13.677.850	15.824.424	17.563.590

Sumber data : Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Sidrap

Dari tabel 7, dapat dilihat perkembangan pengeluaran rutin dari setiap komponen pengeluaran rutin pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dalam kurun waktu tahun lima tahun

anggaran. Pada tahun 1992/1993 realisasi pengeluaran rutin Pemda Sidrap sebesar Rp. 10,2 milyar, tahun 1993/1994 jumlahnya sebesar Rp 12,7 milyar, tahun 1994/1995 Rp 13,6 milyar, tahun 1995/1996 Rp 15,8 milyar dan tahun 1996/1997 sebesar Rp 17,5 milyar.

Peningkatan total pengeluaran rutin dari tahun 1992/1993 - 1996/1997 disebabkan oleh perkembangan kegiatan aktifitas sehari-hari daerah tersebut, dan terjadi perubahan besarnya subsidi belanja pegawai yang senantiasa diikuti oleh perkembangan pegawai negeri sipil di daerah ini.

Pengeluaran rutin antara lain digunakan untuk pembiayaan aparatur pemerintah, menampung pengeluaran untuk subsidi kepada daerah otonomi, serta untuk membantu pemerintah daerah membiayai kegiatan operasional pemerintah dan pelaksanaan program-program pemerintah yang dilakukan di daerah.

5.2.4 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pengeluaran Rutin Kabupaten Sidenreng Rappang.

Setiap tahun anggaran senantiasa terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan. Keadaan tersebut selain ditunjang oleh adanya peraturan serta petunjuk pelaksanaannya juga merupakan upaya dan strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, yang setiap saat mengalami perkembangan.

Perubahan anggaran yang terjadi dari tahun ke tahun dalam APBD mencerminkan jenis kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut, oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu ditingkatkan untuk membiayai berbagai pengeluaran rutin untuk menunjang pemerintahan daerah. Sehubungan dengan itu maka perlu melihat besarnya kontribusi

pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin Sidenreng Rappang Tahun 1992/1993 - 1996/1996 sebagai berikut :

Tabel 8. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pengeluaran Rutin Dalam APBD Kabupaten Sidrap (Rp.000)

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pengeluaran Rutin	Kontribusi (%)
1992/1993	1.505.734	10.253.570	14,86
1993/1994	1.585.175	12.737.347	12,44
1994/1995	2.084.817	13.677.750	15,24
1995/1996	2.238.205	15.824.424	14,14
1996/1997	3.105.609	17.563.590	17,68
TOTAL	10.519.540	70.056.581	15,02

Sumber Data : Tabel 5 dan 7 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka nampak terlihat bahwa kontribusi PAD terhadap pengeluaran rutin dalam APBD Kabupaten Sidrap selama tahun anggaran 1992/1993-1996/1997. Secara absolut pendapatan asli daerah dan pengeluaran rutin selama lima tahun meningkat, tetapi persentase kontribusinya bervariasi

mulai dari yang terkecil 2,44% hingga terbesar 17,68%.

Pada tahun 1992/1993 kontribusi PAD terhadap pengeluaran rutin sebesar 14,86%, tahun 1993/1994 mengalami penurunan yang mencapai 12,44%. Penurunan ini disebabkan oleh besarnya pengeluaran rutin terutama di sebabkan oleh besarnya porsi dana yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai. Pada tahun 1994/1995 naik menjadi 15,24%, kenaikan tersebut karena peningkatan yang cukup tinggi pada sisi pendapatan asli daerah sehingga kontribusinya terhadap pengeluaran rutin meningkat. Sedangkan tahun 1995/1996 kegiatan pengeluaran rutin yang digunakan untuk pembiayaan aparatur pemerintahan, pembiayaan kegiatan operasional pemerintah di daerah dan lain-lain. Pengeluaran rutin tersebut naik hingga kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran rutin menurun, hanya mencapai 14,48%. Selanjutnya pada tahun

1996/1997 penerimaan pendapatan asli daerah dan kegiatan pengeluaran rutin meningkat hingga kontribusinya naik sebesar 17,68%.

Secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap pengeluaran rutin hanya mencapai 15,02%. Angka ini dapat disimpulkan bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin yang terlihat dalam APBD adalah kecil. ini memberi indikasi bahwa dari hipotesa yang diajukan telah terbukti.

4.2.5 Hambatan-Hambatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Dengan melihat realisasi penerimaan pendapatan asli daerah selama tahun 1992/1993 - 1996/1997 Sidenreng Rappang tersebut di atas, yang mana hanya merupakan sumber penerimaan ketiga Pemda tingkat II Sidrap setelah sumbangan dan bantuan dan bagi hasil pajak/bukan pajak. Dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka pemerintah Kabupaten Sidrap terus berupaya memaksimalkan

penerimaannya, dan merupakan salah satu penerimaan untuk membiayai kegiatan-kegiatan rutinitas pemerintahan daerah, sehingga diperlukan upaya dan strategi untuk memacu pertumbuhan dan besarnya perolehan penerimaan setiap tahunnya.

Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah terus digalakkan terutama untuk pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Olehnya itu pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang harus melakukan berbagai upaya baik berupa Intensifikasi, Eskstensifikasi, peninjauan kembali peraturan daerah, maupun upaya-upaya lainnya untuk melibatkan masyarakat sebagai subyek penerimaan agar mereka termotivasi dalam memenuhi kewajibannya, akan tetapi data kondisi obyektif melalui pendekatan makro membuktikan masih rendahnya penerimaan yang dicapai. Keadaan demikian memerlukan kajian yang lebih jauh dan spesifik.

Rendahnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Sidrap karena adanya hambatan-hambatan yang menyebabkan seringnya terjadi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak terealisasi sesuai dengan target yang ditetapkan.

Hasil wawancara atau tanggapan dari responden tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidrap, adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Wajib Pajak

Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang menjadi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kesadaran merupakan suatu sikap mental yang sangat sulit untuk diatasi. Banyak hal yang ditemui didalam masyarakat baik di bidang apapun saja bahkan faktor kesadaran merupakan suatu hambatan yang sulit dipecahkan.

Untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi

kewajibannya dapat dilihat dalam tanggapan responden pada tabel berikut ini :

Tabel 9
Tanggapan responden tentang Kesadaran
Wajib Pajak dalam Membayar Kewajibannya

Klasifikasi Jawaban	Frekuensi (orang)	Persentase (%)
Sangat Tinggi	7	17,5
Cukup tinggi	10	25
Kurang Tinggi	20	50
Tidak Tinggi	3	7,5
Jumlah	40	100

Sumber data : Data Primer di olah, 1998

Oleh karena masalah ini terdapat diantara wajib pajak dengan petugas pajak, sehingga tidak mudah tercapai suatu hal yang diinginkan manakala keaktifan terletak pada satu pihak saja. Oleh karena itu kerjasama sangat dibutuhkan dalam menanggulangi kesulitan ini, baik sebagai wajib pajak maupun sebagai petugas pajak.

2. Pengawasan dan Koordianasi

Pengawasan merupakan salah satu faktor esensial dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan instruksi atau asas yang telah ditentukan, dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam bekerja untuk kemudian diperbaiki dan juga dapat diketahui apakah hal tersebut berjalan secara efektif dan efisien atau tidak. Dengan pengawasan dapat dijamin segala segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana dan apabila ada ketidakcocokan atau kesalahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai pentingnya pengawasan dengan koordinasi yang ditingkatkan di Kabuptaten Sidrap, dapat dilihat dalam tabel 10 dibawah ini:

Tabel 10
Tanggapan Responden Tentang Pentingnya
Peningkatan Pengawasan dan Koordinasi oleh
Aparat Pengelola Pendapatan Daerah

Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Presentase
Sangat Penting	25	62,5
Cukup Penting	12	30
Kurang Penting	3	7,5
Tidak Penting	-	-
Jumlah	40	100

Sumber data : Hasil Kuesioner, November 1998.

Dari tabel tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa responden menganggap sangat penting ditingkatkan pengawasan dan koordinasi oleh aparat pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Sidrap. Koordinasi dan pengawasan belum berjalan sepenuhnya dimana belum adanya perpaduan antara dinas/instansi/satuan kerja lainnya dalam penyusunan program sistem penagihan. Pada tingkat koordiansi, keterkaitan fungsional DISPENDA dengan instansi pemungut lainnya dengan DISPENDA sebagai koordinator pemungutan penerimaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Contoh, mekanisme yang lazim terjadi adalah

DISPENDA menerima target penerimaan yang disodorkan instansi pemungut. Bagaimana target tersebut dihitung dan ditetapkan tidak begitu jelas, minimal bagi pihak DISPENDA.

3. Peraturan Perpajakan

Masalah peraturan perpajakan merupakan masalah yang tidak kecil, dalam praktek selalu akan dijumpai wajib pajak yang selalu berusaha menghindari kewajiban yang timbul dari Undang-Undang Pajak. Hal ini disebabkan karena peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah belum berlaku kepada wajib pajak sebagaimana mestinya. Keadaan seperti ini senantiasa disadari oleh pembuat undang-undang pajak dimana setiap kali membuat ketentuan sebagai sanksi terhadap para pelanggarnya.

Penyebab lainnya adalah bahwa banyak wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan yang ditetapkan dalam pelaksanaan pemungutannya. Oleh karena itu

diharapkan petugas pajak dapat memberikan peraturan-peraturan yang memadai melalui media, seperti panplet, brosur dan media lainnya. Dengan demikian masyarakat memahami betul akan hak dan kewajibannya serta sanksi. Sanksi bila terjadi pelanggaran atas kelalaian dalam membayar pajak. Untuk mengetahui lebih jauh tentang tingkat pemahaman wajib pajak atas peraturan perpajakan di Kabupaten Sidrap dapat dilihat pada tabel 11 berikut ini :

Tabel 11
Tanggapan Responden Tentang Tingkat
Pemahaman Wajib Pajak Atas peraturan Perpajakan

Klasifikasi Jawaban	Frekuensi	Persentase
Sangat Paham	16	15
Cukup Paham	12	30
Kurang Paham	18	45
Tidak Paham	4	10
Jumlah	40	100

Sumber Data: Hasil Kuesioner, November 1998.

Dari Gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan masih kurang

sehingga perlu adanya informasi yang lebih jelas tentang peraturan perpajakan.

Dari berbagai hambatan yang dikemukakan di atas, pemerintah Kabupaten Sidrap juga telah berupaya untuk mengatasinya dengan menempuh langka-langka sebagai berikut :

1. Melakukan penyempurnaan dalam bidang kepegawaian dengan menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang dibutuhkan, peningkatan mutu pegawai dan peningkatan disiplin dikalangan pegawai agar mereka bergairah dalam bekerja dan sekaligus memberikan motivasi dalam pencapaian tujuan operasional.
2. Mengusahakan penyediaan sarana prasarana berupa gedung-gedung dan peralatan-peralatan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah, retribusi serta sumber-sumber pendapatan daerah lainnya.

3. Intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang pekerjaan.

a. Kegiatan intensifikasi dengan :

- Memberikan penyuluhan pada wajib pajak tentang arti pentingnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah bagi pembiayaan pembangunan.
- Meningkatkan aktifitas penagihan secara langsung di lapangan oleh aparat.
- Melakukan penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur pemungutan komponen-komponen dalam sumber Pendapatan Asli Daerah/penyempurnaan peraturan perpajakan dan peraturan pemerintah lainnya.
- Meningkatkan pengawasan/koordinasi, melalui pengawasan dapat diketahui apakah sesuai dengan rencana instruksi atau alat yang telah ditentukan. Dapat diketahui kesulitan dan kelemahan dalam

bekerja untuk kemudian dipublikasikan dan dapat juga diketahui apakah hal tersebut berjalan efektif dan efisien atau tidak dengan pengawasan dapat dijamin segala sesuatu kesalahan yang terjadi. Bagi pengawasan Intern maupun ekstern yang dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional (ITWILKAB).

b. Kegiatan ekstensifikasi dilakukan dengan pendataan terhadap objek/subjek pajak baru pada setiap Kecamatan, Desa/Kelurahan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Realisasi penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Sidrap selama tahun anggaran 1992/1993-1996/1997 mengalami peningkatan. Pada tahun anggaran 1992/1993 mencapai angka Rp. 15,5 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp 26,3 milyar pada tahun 1996/1997. Sektor Retribusi daerah menjadi penyumbang tertinggi terhadap PAD sebesar 84,10% menyusul pajak daerah sebesar 10,83%, laba BUMD sebesar 1,82%, dan sektor penerimaan dinas-dinas serta penerimaan lain-lain.
2. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sidrap dewasa ini masih membutuhkan dana yang cukup besar. Untuk itu penerimaan sumber PAD perlu terus ditingkatkan, karena selama ini dana untuk pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sidrap sebagian besar dibiayai oleh pemerintah pusat melalui sektor sumbangan dan bantuan sebesar Rp 79,2 milyar.

3. Setelah dilakukan perhitungan perhitungan dengan menggunakan rumus persentase PAD terhadap pengeluaran rutin didapat hasil bahwa kontribusi PAD terhadap pengeluaran rutin dalam APBD Sidrap selama tahun anggaran 1992/1993-1996/1997 masih kecil yaitu sebesar 15,02% per tahun.
4. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Sidrap dalam meningkatkan PAD adalah sebagai berikut :
 - Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.
 - Pengawasan dan Koordinasi belum berjalan dengan sepenuhnya.
 - Penyebab lainnya adalah bahwa banyak wajib pajak belum memahami peraturan perpajakan yang diterapkan dalam pemungutannya.

6.2 SARAN-SARAN

1. Penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) perlu ditingkatkan mengingat jumlahnya yang relatif kecil dibandingkan dengan sektor sumbangan/bantuan dari pemerintah pusat setiap tahunnya. Kecilnya sumber pendapatan ini antara lain disebabkan oleh mekanisme identifikasi objek/sumber penerimaan, sistem, prosedur dan sumberdaya aparat Dispeda yang masih perlu disempurnakan dan ditingkatkan unjuk kerjanya.
2. Perlunya ditingkatkan pembinaan kesadaran masyarakat agar mereka menyadari akan kewajibannya untuk membayar dan melunasi pajak dan retribusi yang dikenakan kepadanya tepat pada waktunya, upaya-upaya penyempurnaan dalam perbaikan-perbaikan dari segi peraturan, pengawasan dan koordinasi, untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan sumbangan tiap-tiap sektor penerimaan PAD terhadap APBD, maka

pemerintah daerah Kabupaten Sidrap harus berupaya terus menerus meningkatkan realisasi penerimaan sumber-sumber PAD sendiri dengan terus menggali sumber-sumber potensi yang baru disamping memaksimalkan penerimaan sumber-sumber yang telah ada dan mengefektifkan serta meningkatkan laba perusahaan daerah, mengefektifkan modal daerah kepada pihak investor serta mengefektifkan penerimaan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Erotodihardjo R. Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, 1991, P.T Eresco, Bandung.
- Bagian keuangan Setwilda TK. II / Bappeda TK. II Sidrap, Analisis APBD TK. II Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 1992/1993 - 1996/1997.
- Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Laporan Tahunan Target dan Realisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. Sumbangan dan Bantuan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun Anggaran 1992/1993 - 1996/1997.
- Kantor Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Angka 1996/1997.
- Mardiasmo, Perpajakan, 1994, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurjaman Arsyad, Bambang Kusumanto, Yuwono Prawiro Setoto, Keuangan Negara, Intermedia, 1992.
- Suparmoko M, Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek BPFE, Yokyakarta, 1997.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 1995, Pradnya Paramita, Jakarta.

....., Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang, 1995, BPS Sulsel, Ujung Pandang.